

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2019 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari sisi pelaksanaan kegiatan terdapat 3 unit pelaksana kegiatan yaitu:

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP).
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP);

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2019 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.544.880.462,- dari pagu 3.514.277.500,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 44.24% berpredikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 50% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu *Pelaksanaan Administrasi Perkantoran* dengan 11 (sebelas) sub kegiatan yakni :
 - a) Honorarium pengelolaan keuangan
 - b) Penyediaan jasa surat menyurat
 - c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - d) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - e) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- f) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- g) Penyediaan alat tulis
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k) Pengamaan aset, kantor dan rumah jabatan

Ditahun 2019 untuk kegiatan yang bersifat rutin semua pendanaannya di masukan dalam 1(satu) dokumen pelaksanaan anggaran dan dikelola di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi keuangan sampai dengan triwulan II terlaksana sebesar 1.399.778.657,- dari pagu Rp. 2.777.770.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 65,34% dengan predikat kinerja **Rendah (R)** dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 79,17% dengan predikat kinerja **Tinggi (T)**. Kegiatan dalam program ini adalah *Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana*.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 891.579.400,- dari pagu dana Rp. 2.639.265.000,- atau dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 30,92% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)** dan rata-rata capaian fisik sebesar 31% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**.
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 317.757.545,- dari pagu dana Rp. 744.675.000,- atau rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 44,44% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)** dan rata-rata capaian kinerja fisik (K) sebesar 47,50% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :
5. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan terealisasi sebesar Rp. 160.410.700,- dari pagu dana Rp. 903.760.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan 32,63% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)** dan capaian kinerja fisik sebesar 33% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Pembinaan*

Pasca Panen berupa pelatihan pasca panen pada 50 kelompok tani dan standarisasi mutu hasil perkebunan.

6. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.073.050,- dari pagu dana Rp 223.710.500,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 33,85% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 75% dengan predikat kinerja **Sedang(S)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengolahan Hasil Perkebunan dengan capaian fisik jumlah produk olahan hasil perkebunan sebanyak 11 (sebelas) Produk yaitu, lada bubuk, lada biji, jahe lada instan, kopi jahe lada, sirup air kelapa, selai daging kelapa, VCO. Gula semut aren, gula cetak aren, es kopyor dan saos lada. Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan sebanyak 2 jenis.
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan realisasi keuangannya pada triwulan II sebesar Rp. 59.267.600,- dari pagu dana Rp. 395.800.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 18,09% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Pada program ini, target kegiatan 50 transaksi dan 2 informasi. Capaian kinerja masih 0% dikarenakan belum adanya undangan untuk mengikuti pameran dan expo untuk kegiatan promosi produksi perkebunan dan untuk pengelolaan informasi pasar diperoleh pada akhir tahun.
8. Program Konservasi Lahan dan Air dengan pagu dana sebesar Rp. 247.750.000,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 46.857.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 21,29% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik (K) yakni 46,15 % dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan dengan target identifikasi embung 130 unit, untuk realisasi sampai dengan triwulan II identifikasi embung sebanyak 60 unit dan untuk kegiatan perlindungan lahan perkebunan dari target 60 PBS sudah realisasi 25 PBS.
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 95.151.400,- dari pagu sebesar Rp. 542.400.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 21,39% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 43,33% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan

yang terdapat dalam program ini adalah kegiatan *Pengembangan Database Usaha Perkebunan* dengan target 2 database. 2 database ini berupa peta sebaran IUP Kaltim dan laporan sebaran perijinan. Database ini diperoleh pada akhir tahun, saat ini masih dalam proses pengumpulan data.

10. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 67.506.280,- dari pagu sebesar Rp. 148.450.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 45,47% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 48,50% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**.
11. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 47.125.600,- dari pagu sebesar Rp. 276.675.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 17,03% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 5,00% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan pada program ini yaitu pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dengan output jumlah kemitraan usaha perkebunan sebanyak 20 kelompok, sampai triwulan II realisasi 1 kelompok, hal ini dikarenakan belum ada usulan dari Kab/Kota.
12. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 154.748.250,- dari pagu sebesar Rp. 401.405.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 44,43% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 75,6% dengan predikat kinerja **Sedang (S)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah *Sertifikasi Benih* dengan realisasi 2.086.326 dari target 2.000.000 benih dan pengujian benih sebanyak 1 jenis (aren).
13. Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 215.557.600,- dari pagu sebesar Rp. 626.260.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 39,35% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 79,76% dengan predikat kinerja **Tinggi (T)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah identifikasi sumber benih sebanyak 2 sumber benih dan pengawasan peredaran benih.
14. Program Pengendalian OPT realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 206.926.435,- dari pagu sebesar Rp. 461.284.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 44,86% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 60%

- dengan predikat kinerja **Rendah (R)**. Dari target 25 kelompok tani sudah tercapai 15 kelompok tani.
15. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 174.528.300,- dari pagu sebesar Rp. 425.060.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 41% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (ST)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dengan target 5.000 Kg/Liter. Masih dalam proses pengadaan.-
16. Program Penyediaan Bahan Tanaman realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 210.223.000,- dari pagu sebesar Rp. 1.495.388.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 14,92% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan dengan target 25.000 benih. Kegiatan ini belum ada realisasi fisik dikarenakan masih dalam proses pengadaan.
17. Program Peningkatan Produksi Perkebunan realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 319.305.000,- dari pagu sebesar Rp. 14.977.395.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 1,44% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan produktivitas perkebunan dengan target 19 ton/ha dan perluasan komoditas perkebunan rakyat dengan target 100 ha. Pada program ini belum ada realisasi fisik dikarenakan masih dalam proses pengadaan.
18. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 10.121.800,- dari pagu sebesar Rp. 228.075.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 4,44% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan petani SL-PHT dengan output jumlah orang terlatih sebanyak 50 orang. Akan dilaksanakan pada triwulan III.
19. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 10.121.800,- dari pagu sebesar Rp. 228.075.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 4,44% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata

capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan petani SL-PHT dengan output jumlah orang terlatih sebanyak 50 orang. Akan dilaksanakan pada triwulan III.

20. Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 8.507.500,- dari pagu sebesar Rp. 355.775.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 2,39% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan petugas lapang (fasda) dan teknis perkebunan. Akan dilaksanakan pada triwulan III.
21. Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 7.150.800,- dari pagu sebesar Rp. 339.425.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 2,11% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan kelompok tani perkebunan dengan output 30 kelompok tani. Akan dilaksanakan pada triwulan III.
22. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 157.496.500,- dari pagu sebesar Rp. 275.800.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 56,91% predikat kinerja **Rendah (R)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan dengan target 1 (Satu) perusahaan yang memanfaatkan limbah POME, kegiatan ini belum terealisasi dikarenakan masih terkendala masalah regulasi dan MoU dengan PLN.
23. Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 8.507.500,- dari pagu sebesar Rp. 355.775.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 2,39% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan petugas lapang (fasda) dan teknis perkebunan. Akan dilaksanakan pada triwulan III.
24. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 126.592.975,- dari pagu sebesar Rp. 347.250.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 36,96% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata

capaian kinerja fisik 63,33% dengan predikat kinerja **Rendah (R)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan pengolahan produk perkebunan dengan target 5 kelompok tani dan pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan dengan target 5%. Dan akan dilaksanakan pada triwulan III.

25. Progam Pengendalian Kebakaran Kebun realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp. 49.662.830,- dari pagu sebesar Rp. 271.500.000,- dengan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 18,29% predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**, untuk rata-rata capaian kinerja fisik 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah (SR)**. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim dengan output luas kebakaran kebun (ha). Sampai dengan triwulan II belum terjadi kebakaran.

Tahun 2019 Dinas Perkebunan melaksanakan 25 (dua puluh lima) program pembangunan perkebunan dengan total anggaran sebesar **Rp. 32.618.850.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 6.357.208.684,-** atau **19,49%** realisasi keuangan dan realisasi kinerja **31,45%**.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel II.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

| No | Indikator | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | |
|----|--|---|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | | | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%) | Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah | 0 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 4.33 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| | Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka | | 0 | 17.544 | 18.773 | 20.087 | 16.361 | 17.544 | 18.773 | 20.087 |

| No | Indikator | Indikator KInerja Kunci (IKK) | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | |
|----|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| | | | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | konstan) | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Perusahaan) | Terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dan tertib hukum | 0 | 43 | 48 | 53 | 38 | 43 | 48 | 53 |
| 3. | NTP pekebun (%) | Meningkatnya kesejahteraan pekebun | 0 | 89 | 92 | 95 | 88.45 | 89 | 92 | 95 |
| 4. | Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) | Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan | | 15.288.465 | 16.812.938 | 17.136.849 | 13.450.768 | 13.450.768 | 16.812.938 | 17.136.849 |
| | a. Kelapa Sawit | | 18.000.000 | 15.197.000 | 16.717.254 | 17.036.402 | 13.371.756 | 13.371.756 | 16.717.254 | 17.036.402 |
| | b. Karet | | 93.250 | 70.533 | 74.060 | 77.763 | 57.389 | 57.389 | 74.060 | 77.763 |
| | c. Kelapa | | 3.850 | 12.105 | 12.468 | 12.479 | 12.746 | 12.746 | 12.468 | 12.479 |
| | d. Kakao | | 10.930 | 3.006 | 3.307 | 3.771 | 2.393 | 2.393 | 3.307 | 3.771 |
| | e. Lada | | 7.420 | 5.317 | 5.849 | 6.434 | 6.484 | 6.484 | 5.849 | 6.434 |
| 5. | Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq) | Menurunnya Emisi dari Sektor Perkebunan | 0 | 4,785 | 4,08 | 4,07 | 1,87 | 4,7 | 4,08 | 4,07 |
| 6. | Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan (Perusahaan) | Tersertifikasinya Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan | 0 | 32 | 35 | 35 | 98 | 32 | 35 | 35 |
| 7. | Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk) | Meningkatnya Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |

Uraian Pencapaian Kinerja

1. Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Tabel II.2

**Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2018)**

| Sektor/Lapangan Usaha | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,47 | 5,65 | 7,00 | 7,72 | 7,96 | 7,96 | 7,88 |
| | 1 Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian | 3,22 | 3,36 | 4,55 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,24 |
| | a Tanaman Pangan | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 |
| | b Tanaman Hortikultura | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
| | c Tanaman Perkebunan | 2,47 | 2,59 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,33 |
| | d Peternakan | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,30 | 0,31 |
| | e Jasa Pertanian dan Perburuan | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| | 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu | 1,19 | 1,11 | 1,16 | 1,33 | 1,34 | 1,15 | 1,15 |
| | 3 Perikanan | 1,07 | 1,18 | 1,30 | 1,50 | 1,54 | 1,46 | 1,48 |

*Data sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Struktur perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh sub sektor perkebunan yang selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 sebesar 2,47 naik menjadi 4,49% pada 2017 dan data sangat sementara tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4,33%.

2. Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan

Tabel II.3

Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2018

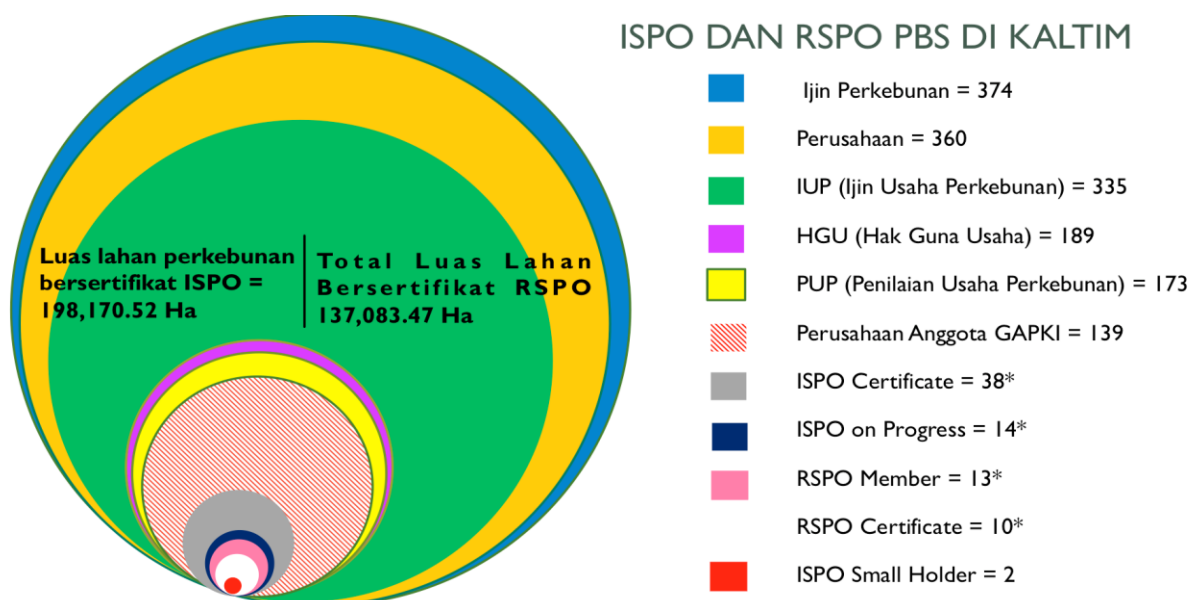
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nilai (miliar rupiah) | 11.591 | 12.835 | 13.721 | 14.151 | 15.324 | 16.361 |
| Persentase (%) | | 10,73 | 6,90 | 3,13 | 8,29 | 6,76 |
| Pertumbuhan | | 1.244 | 886 | 430 | 1.173 | 1.037 |

*Data sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Pada 2018 peningkatan mencapai 6,76 %.

3. Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan

Gambar II.1
ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur Tahun 2018

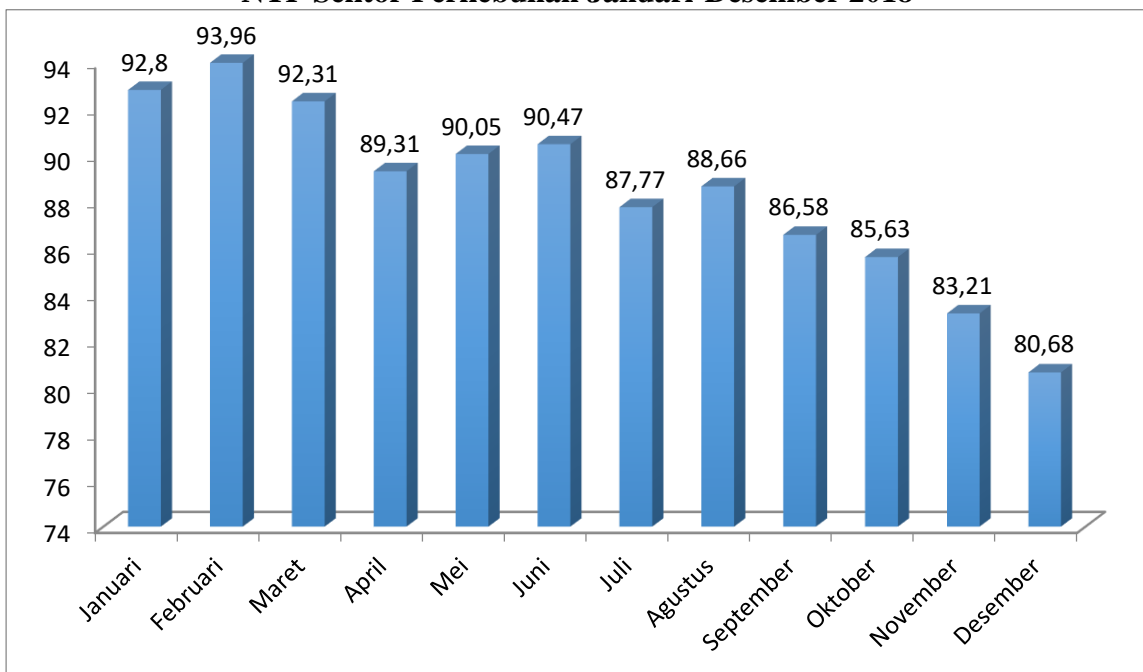


Dari 360 Perusahaan di Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Perusahaan telah mendapat sertifikat ISPO dengan luas 198.885,52 HA atau sekitar 16,68% dari total luas perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

4. NTP Pekebun

Jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), selama tahun 2018 rata-rata NTP sektor perkebunan sebesar 88,45%. NTP subsektor perkebunan rakyat terlihat cenderung menurun pada semester pertama dan pada semester kedua nilainya menjadi sangat fluktuatif terutama pada bulan Juli sampai Oktober. NTP subsektor perkebunan rakyat selama 2018 tidak pernah mencapai angka 100 sehingga dapat dikatakan bahwa selama 2018 petani perkebunan rakyat selalu mengalami defisit. Bulan Februari merupakan bulan dengan NTP tertinggi, yaitu sebesar 93,96, hampir mendekati 100 dan Bulan Desember merupakan angka terendah NTP yakni sebesar 80,21 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II.2
NTP Sektor Perkebunan Januari-Desember 2018



5. Produksi Komoditas Perkebunan

a) Tanaman Kelapa Sawit

Seiring dengan pencanangan program satu juta hektar kelapa sawit di Kalimantan Timur, luas kelapa sawit mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2014 luas tanaman kelapa sawit sebanyak 1.020.413 hektar dan pada tahun 2018 luas tanaman menjadi 1.199.407 hektar, sehingga terjadi kenaikan sebanyak 178.994 hektar atau 17,54 persen. Peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) meningkat tajam ditahun 2018 menjadi 13.291.773 ton tandan buah segar (TBS) dari 9.628.072 ton (2014), sehingga peningkatannya sebesar 3.663.701 ton TBS atau 38,05 persen.

b) Tanaman Karet

Komoditi karet turut mengalami kenaikan luasan secara signifikan seiring terlaksananya program revitalisasi karet di wilayah Kabupaten dan Kota. Luas tanaman karet mengalami kenaikan sebanyak 1.597 hektar atau 1,41 persen, dimana pada tahun 2014 luas tanaman karet masih 113.485 hektar menjadi 115.082 hektar pada tahun 2018. Produksi karet di tahun 2014 sebesar 63.281 ton karet kering dan pada tahun 2018 turun menjadi 57.389 ton karet kering sehingga mengalami

penurunan sebesar 5.892 ton karet kering atau 9,31 persen. Hal ini di karenakan harga yang rendah, sehingga petani karet tidak melakukan penyadapan yang berpengaruh terhadap nilai produksi karet.

c) Tanaman Kakao

Komoditi kakao mengalami penurunan luas tanam sebanyak 2.216 hektar atau 23,29 persen, dimana pada tahun 2014 luas tanam kakao mencapai 9.514 hektar menjadi 7.298 hektar pada tahun 2018. Penurunan luas tanam akibat tidak seimbangnya antara peremajaan (penanaman baru) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. Selain itu adanya alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan. Hal ini seiring dengan terjadinya penurunan terhadap produksi kakao sebesar 1.660 ton biji kakao kering atau 40,96 persen, dimana pada tahun 2014 produksi sebesar 4.053 ton dan pada tahun 2018 menjadi 2.393 ton.

d) Tanaman Kelapa Dalam

Komoditi kelapa dalam di Kalimantan Timur juga mengalami penurunan luas tanam sebanyak 4.834 hektar (18,12 persen) dari 26.674 hektar pada tahun 2014 menjadi 21.840 hektar pada tahun 2018. Penurunan luas tanam akibat tidak seimbangnya antara peremajaan (penanaman baru) dengan jumlah tanaman yang telah tua dan mati. Penurunan luasan kelapa dalam diikuti dengan kenaikan jumlah produksi yang mana pada tahun 2014 produksi kelapa dalam sebesar 11.424 ton dan tahun 2018 menjadi 12.746 ton sehingga jumlah kenaikan sebesar 1.322 ton atau 11,57 persen.

e) Tanaman Lada

Komoditi lada mengalami penurunan luas tanam akibat banyaknya tanaman tua dan mati, alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit, tanaman pangan dan sektor pertambangan. Pada tahun 2014 luas tanam sebanyak 9.497 hektar menjadi 9.021 hektar pada tahun 2018, sehingga mengalami penurunan sebanyak 476 hektar atau 5,01 persen. Produksi lada mengalami penurunan akibat berkurangnya luas tanam produktif dan minimnya pemeliharaan tanaman. Pada tahun 2014 produksi sebesar 6.704 ton lada kering dan tahun 2018 produksi lada menjadi 6.484 ton lada kering sehingga terjadi penurunan produksi sebesar 220 ton lada kering atau 3,28 persen.

6. Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan

Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan pada tahun 2017 mencapai 1,87 juta ton CO₂eq. Diharapkan pada tahun 2018 penurunan dapat mencapai 4,785 Juta ton CO₂eq. Penurunan emisi pada sektor perkebunan diprediksi akan mengalami kenaikan seiring dengan adanya kegiatan perluasan yang dilakukan setiap tahunnya.

7. Sertifikasi Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan

Dari 329 IUP di Kaltim, pada tahun 2018 sebanyak 200 IUP telah melakukan pengajuan PUP dan yang telah dilakukan penilaian sebanyak 173 IUP dengan jumlah Tahap Pembangunan A hingga E sebanyak 83 dan jumlah Tahap Operasional I hingga IV sebanyak 90 IUP yang tersebar di 6 kabupaten yaitu Paser, PPU, Kukar, Kubar, Kutim dan Berau.

8. Jumlah Produk Perkebunan yang Bersertifikat SNI

Sampai dengan tahun 2018, belum ada produk perkebunan yang bersertifikasi SNI. Karena program tersebut dilaksanakan pada tahun 2020.

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2018 – 2023.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berupa peluang dan ancaman juga kekuatan dan kelemahan yang ada terkait dengan dinamika

lingkungan strategis, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2018, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 394 ijin seluas 3.089.234 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.594.626 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2017 adalah 1.192.342 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 1,2 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

Tabel II.4
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2017

| No. | Kabupaten/Kota | PEMANFAATAN LAHAN | | | Realisasi Tanam Kebun Inti (ha) |
|-----|-------------------|---|----------|----------|---------------------------------|
| | | Luas yang Telah Dibebani Ijin Perkebunan (Ha) | IUP (Ha) | HGU (Ha) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Berau | 314,581 | 207,314 | 123,604 | 92,650 |
| 2 | Kutai Timur | 791,203 | 749,947 | 357,568 | 352,882 |
| 3 | Kutai Kertanegara | 679,578 | 668,980 | 266,478 | 189,657 |
| 4 | Kutai Barat | 549,974 | 419,488 | 163,331 | 121,226 |

| No. | Kabupaten/Kota | PEMANFAATAN LAHAN | | | Realisasi Tanam Kebun Inti (ha) |
|-----|---------------------|---|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | Luas yang Telah Dibebani Ijin Perkebunan (Ha) | IUP (Ha) | HGU (Ha) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Mahakam Ulu | 269,723 | 178,076 | 35,047 | 19,862 |
| 6 | Penajam Paser Utara | 136,031 | 136,726 | 31,589 | 30,406 |
| 7 | Paser | 348,144 | 234,094 | 134,899 | 86,714 |
| 8 | Samarinda | - | - | - | - |
| 9 | Balikpapan | - | - | - | - |
| 10 | Bontang | - | - | - | 20 |
| | Jumlah | 3,089,234 | 2,594,626 | 1,112,515 | 893,417 |

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2018)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak clear dan cleannya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek landbanking yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Lambatnya Realisasi Pembangunan Perkebunan** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- Tidak clear dan clean nya perijinan di sektor perkebunan;
- Pengawasan dan penegakan hukum terdapat pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU
- Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan tidak dicabut;

- d. Adanya ijin perkebunan pada lokasi lokasi yang tidak sesuai;
- e. Upaya pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun kelapa sawit masa pembangunan dan operasional tidak semuanya dilakukan penilaian; dan
- f. Konflik lahan akibat terjadi tumpang tindih masalah perizinan usaha perkebunan.
- g. Kebijakan pembangunan perkebunan dalam hal pemberian ijin antara Provinsi dan Kab belum selaras.
- h. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi dan pengawasan yang modern berbasis IT dan spasial.

2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,46% (4,49% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2013-2017 pada tabel berikut:

Tabel II.5
Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2017

| Komoditi | Produktivitas (Ton/Ha) | | | | | Potensi berdasarkan PDKP |
|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Kelapa Sawit | 15.23 | 14.76 | 15.39 | 14.47 | 15.72 | 20.00 |
| Karet | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.34 | 1.67 |
| Kakao | 0.904 | 0.707 | 0.765 | 0.552 | 0.501 | 1.00 |
| Kelapa Dalam | 0.654 | 0.564 | 0.684 | 0.634 | 0.802 | 1.50 |
| Lada | 1.046 | 1.034 | 1.061 | 0.724 | 0.985 | 1.20 |
| Kopi | 0.286 | 0.229 | 0.215 | 0.243 | 0.256 | 1.30 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk di tingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Permasalahan “**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan permodalan;
2. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;
3. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;
4. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS ;
5. Ketersediaan bibit yang berkualitas kurang;
6. Penggunaan bibit yang illegitim;
7. Praktek budidaya yang tidak tepat;
8. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit terhambat

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 162.899 Ha pada tahun 2016 dan 159.725 Ha pada tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, areal komoditi non sawit mengalami penurunan hingga mencapai 1,95%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan “**Pengembangan komoditas perkebunan non sawit terhambat**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya harga komoditas non sawit;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya; dan
- d. Minat pasar terhadap komoditas non sawit masih rendah.

4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kaltim, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah

Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern;
- b. Kurangnya pelatihan dan praktek mengolah mandiri oleh para pekebun;
- c. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah masih menggunakan alat dan mesin manual/sederhana;
- d. Kurangnya Sosialisasi, Promosi dan pengenalan komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/Kota;
- e. Terbatasnya akses Informasi tentang pasar/harga produk komoditi perkebunan;
- f. Keterbatasan infrastruktur dasar untuk menarik investasi;
- g. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- h. Tataniaga produk perkebunan yang sangat rumit/panjang; dan
- i. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani.

5. Kampanye negatif dan tuntutan isu lingkungan di sektor perkebunan

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional dan nasional dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan

Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan **“Kampanye negatif dan tuntutan isu lingkungan di sektor perkebunan”** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Perang dagang antar negara,
- b. Tidak dipahami usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam upaya membangun kebun yang berkelanjutan,
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang untuk pembangunan kebun sawit;
- d. Pembangunan kebun rakyat yang berada di kawasan hutan;
- e. Praktek perlindungan areal HCV diareal perkebunan masih lemah;
- f. Belum diterapkannya secara menyeluruh standar pengelolaan lingkungan di sektor perkebunan
- g. Supply Chain produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- h. Belum selarasnya kebijakan pembangunan Perkebunan di tingkat Provinsi dan Praktek perijinan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten.

6. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pembangunan Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisi data tabular variabel kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu : Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.

Akar permasalahan **“Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah”** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;
- c. Sistem pelaporan belum ada referensi secara spasial;
- d. Kurangnya dukungan SDM dalam pengelolaan data;
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik; dan
- f. Infrastruktur pengelolaan data di Kabupaten/Kota masih terbatas.

7. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia perkebunan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan sektor perkebunan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan perkebunan yang lebih berkualitas, Dinas Perkebunan masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencanaan yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait pengelolaan perkebunan di Kalimantan Timur.

Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertanggung jawabkan struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**masih rendahnya kapasitas kelembagaan dinas**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Kelembagaan yang menjamin keberpihakan kepada petani masih lemah serta masih lemahnya kelembagaan pengembangan komoditas dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Pengembangan iptek yang dibutuhkan oleh dunia usaha belum optimal;
- c. Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana prasarana; dan
- d. Intansi yang mengurus Perkebunan di Kab/Kota bergabung dengan urusan lain.

II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*) terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Kekuatan yang dimiliki :

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat.
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai.
- Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Disbun cukup memadai.
- Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan
- Hasil pembangunan bidang perkebunan selama ini
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang perkebunan.

2. Peluang yang dimiliki :

- Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang perkebunan.
- Potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif.
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif.
- Adanya pengaruh globalisasi.
- Ketergantungan hasil perkebunan masyarakat cukup tinggi.

3. Kelemahan yang dimiliki :

- Belum lengkap dan akuratnya *data-based* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kaltim.
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal.
- Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan.

- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai.
- Lemahnya penegakan hukum.
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik.
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masih rendah

4. Ancaman yang dimiliki :

- Implementasi Tata Ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan.
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan.
- Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang.
- Moratorium ijin pengembangan perkebunan.
- Isu emisi gas rumah kaca.
- Perubahan cuaca/iklim imbas dari global warming.
- Aksesibilitas kekawasan perkebunan masih terbatas.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan.
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal.
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal.
4. Optimalisasi sistem informasi database dalam mendukung pembangunan perkebunan.
5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah.
6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kebun.
7. Koodinasi internal maupun eksternal secara intensif.
8. Tingkatkan konsolidasi internal.

9. Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat serta konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang perkebunan sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan.
10. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Disbun cukup memadai dan potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif membuat kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal.

II. 5. Review Terhadap Rancangan RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Peningkatan Produksi Perkebunan, Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca, Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan, dan Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD (Tabel TC. 31).

II. 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

2. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
4. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Berdasarkan hasil forum OPD Lingkup Dinas Perkebunan se Kalimantan Timur, berikut beberapa program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi.

Tabel. II. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Timur

I. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN

| NO. | URAIAN KEGIATAN | VOL (Ha) | LOKASI | TARGET LUAS (Ha) | Ket |
|--|----------------------------|-------------|--|--|-----|
| PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOMODITI PERKEBUNAN | | | | | |
| 1 | Intensifikasi Kelapa Sawit | 200 | Kab. Kutim Kab. Kubar Samarinda Kab. Kukar | 50 50 50 50 | |
| 2 | Intensifikasi Karet | 100 | Jumlah Kab. Kuitm Kab. Kubar Kab. Kukar Kab. PPU Balikpapan | 200 20 20 20 20 20 | |
| 3 | Intensifikasi Kakao | 100 | Jumlah Kab. Kuitm Kab. Berau | 100 50 50 | |
| 4 | Intensifikasi Kelapa | 20 | Jumlah Kab. PPU | 100 20 | |
| 5 | Intensifikasi Lada | 100 | Jumlah Kab. Kutim Kab. Kukar Kab. Kubar Samarinda Kab. Berau Balikpapan | 20 20 20 20 10 20 10 | |
| 6 | Rehabilitasi Lada | 160 | Jumlah Kab. Berau Kab. Kukar Samarinda Kab. Kutim Kab. Paser Kab. PPU | 100 25 50 20 15 10 40 | |
| 7 | Peremajaan Karet | 100 | Jumlah Kab. Paser | 160 100 | |
| 8 | Peremajaan Kakao | 50 | Jumlah Kab. Kutim Kab. Berau | 100 25 25 | |
| | | | Jumlah | 50 | |

| NO. | URAIAN KEGIATAN | VOL | LOKASI | TARGET LUAS (Ha) | Ket |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----|---|--|-----|
| PERLUASAN KOMODITI PERKEBUNAN | | | | | |
| 1 | Perluasan Tanaman Kelapa Sawit | 150 | Kab. PPU Kab. Kutim Kab. Kubar | 50 50 50 | |
| | | | Jumlah | 150 | |
| 2 | Perluasan Tanaman Kelapa | 20 | Kab. Kutim Kab. PPU | 5 15 | |
| | | | Jumlah | 20 | |
| 3 | Perluasan Tanaman Lada | 200 | Samarinda Kab. Paser Kab. Kutim Kab. Berau Kab. Kubar Kab. PPU Balikpapan Kab. Kukar | 45 20 10 25 30 25 15 30 | |
| | | | Jumlah | 200 | |
| 4 | Perluasan Tanaman Kakao | 150 | Kab. Berau Kab. Kutim | 100 50 | |
| | | | Jumlah | 150 | |
| 5 | Perluasan Tanaman Karet | 200 | Samarinda Kab. PPU Kab. Kubar Kab. Kutim Balikpapan | 45 50 70 20 15 | |
| | | | Jumlah | 200 | |